KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SENIN : 11 JANUARI 2021
EDISI : 00226279/GBP/I/2021

KLIPING

Berita Pertanian

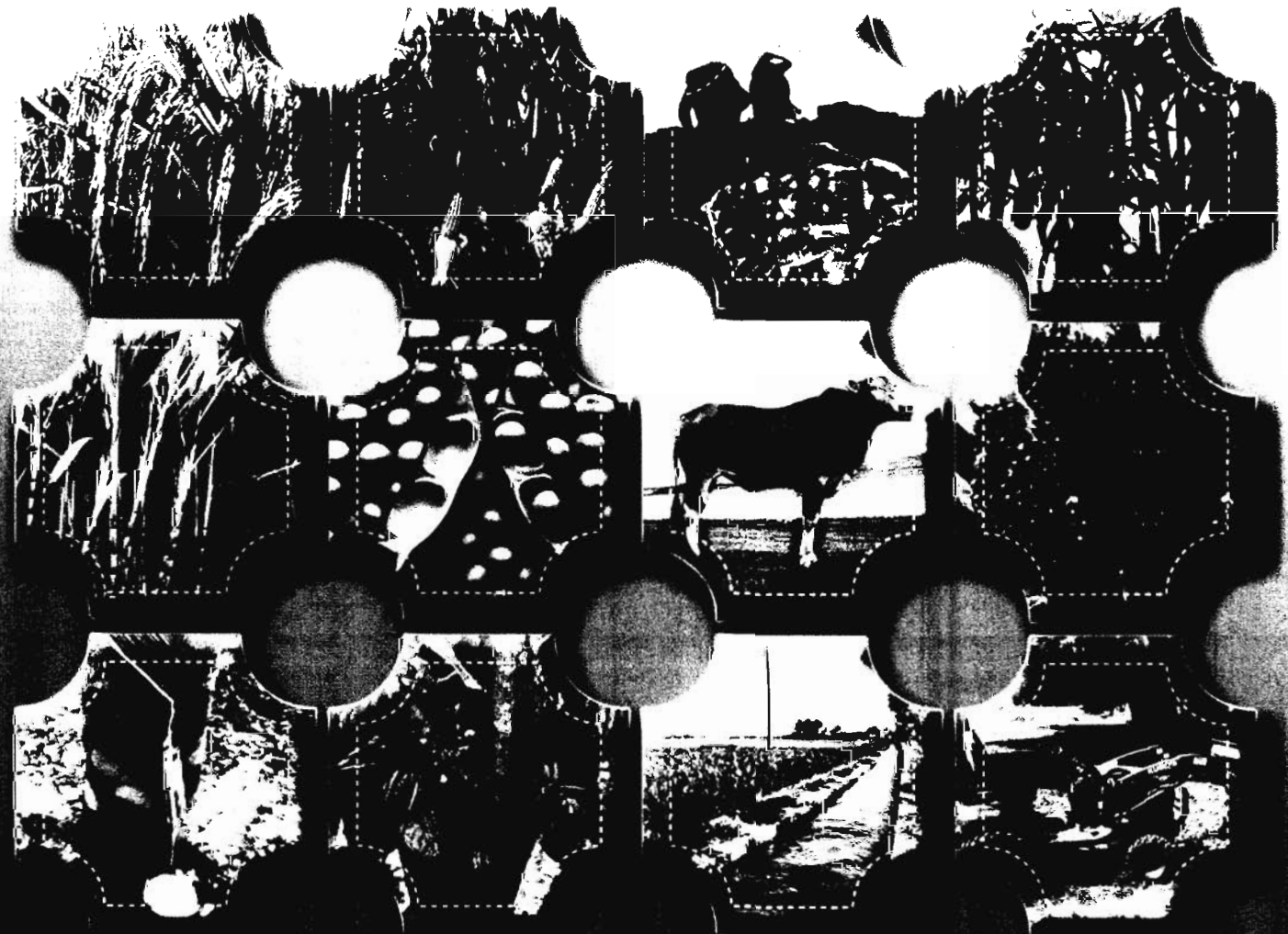

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK

Jl. Harsono RM. No 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Telp. (021) 7806 131 Ext. 2303, 2308, Email : humas-ip@pertanian.go.id
Website : www.pertanian.go.id

GUNTINGAN BERITA DAN PENDAPAT MENGENAI PERTANIAN

SENIN, 11 JANUARI 2021

I. **BERITA-BERITA MENGENAI PERTANIAN :**

1. **TANAMAN PANGAN :**
   - Hama Tius Meresahkan Petani di Sumenep (MI) 1

2. **PERKEBUNAN :**
   - Industrin Hilir Sawit Butuh Penguatan Infrastruktur (ID) 2-3

3. **KETAHANAN PANGAN:**
   - Harga Kedelai Impor Rp. 8.500/Kg (ID) 4
   - Harga Telur dan Daging Ayam Bergerak Turun (R) 5

4. **PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN :**
   - Tolong Ya, Bikin Petani Sejahtera (RM)..... 6

II. **PENDAPAT MENGENAI PERTANIAN ARTIKEL DAN OPINI :**

   - Antiklimaks Drama Kedelai (R) 7-8
   - Tahu dan Tempe Makin Dicari di Masa Pandemi (K) 9-11
   - Realisasi Harga Jawaban Masalah Kedelai (MI) 12-15
   - Saatnya Memuliakan Petani (KN) 16-18

00000000000000000 OOO 00000000000000

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	**TANGGAL**	/
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	**HALAMAN**	/
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	**RUBRIKASI**	☐ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya		☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan		☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post		☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika	☐ Fajar		☐ Pojok/Karikatur

Hama Tikus Meresahkan Petani di Sumenep

SELAIN banjir, hama menjadi gangguan yang merisaukan petani. Di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, petani di tiga kecamatan mengeluhkan serangan hama tikus. "Tikus makan bagian batang dan menyebabkan padi mati. Saat ini, tikus menyerang pesawahan di Kecamatan Gapura, Kota, dan Lenteng," ungkap Rasyidi, petani Desa Cangkreng, Lenteng, kemarin. MI. 11/1/19

Hewan pengerat memakan padi yang baru berusia dua bulan. Selain padi, tikus juga menyerang tanaman jagung di wilayah yang sama. "Kami terpaksa melakukan tanam ulang. Tapi masih menunggu hama tertangani agar tidak tambah merugi," kata Suyanto, petani Desa Nambakor, Kecamatan Kota.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian Sumenep, Sufriyadi mengatakan luas area pertanian yang diserang tikus mencapai 51 hektare. Area serangan terus meluas. "Kami akan mengupayakan pemberantasannya dalam waktu dekat sehingga petani bisa menanam lagi." (MG/N-2)

SUBJEK

- ☐ Tanaman Pangan
- ☐ Hortikultura
- ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan
- ☐ Perkebunan
- ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian
- ☐ Litbang Pertanian
- ☐ Ketahanan Pangan
- ☐ Karantina Pertanian
- ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- ☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL	/
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN	/
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI	☐ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya		☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan		☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post		☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika	☐ Fajar		☐ Pojok/Karikatur

Industri Hilir Sawit Butuh Penguatan Infrastruktur

Oleh **Tri Listiyarini** 10/1/17

▶ JAKARTA–Industri hilir sawit nasional membutuhkan penguatan infrastruktur, di antaranya dengan pembukaan pelabuhan baru di pantai barat Sumatera dan Kalimantan Timur, sehingga produk hilir sawit Indonesia lebih mudah dan murah menjangkau pasar ekspor, khususnya Eropa, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Semakin banyak produk hilir sawit Indonesia di pasar ekspor maka kesempatan Indonesia menjadi Raja Hilir Sawit Dunia pun semakin besar.

Sahat Sinaga

Pemerintah menyatakan tengah berupaya mengubah posisi Indonesia dari Raja CPO menjadi Raja Hilir Sawit pada 2045 mendatang. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, untuk menjadi Raja Hilir Sawit dunia maka Indonesia harus membanjiri pasar ekspor dengan produk hilir sawit nasional. Hal itu bisa tercapai apabila produk hilir sawit Indonesia lebih mudah dan murah dalam menjangkau pasar ekspor. "Salah satu strategi yang bisa ditempuh agar Indonesia menjadi Raja Hilir Sawit dunia

[redacted]

[redacted] pantai barat Sumatera dan Kalimantan Timur," kata Sahat kepada *Investor Daily*, baru-baru ini.

Sahat menjelaskan, dengan adanya pelabuhan di wilayah pantai barat Sumatera tersebut maka ongkos angkut produk hilir sawit Indonesia ke pasar Eropa akan lebih murah US$ 8-10 per ton dibanding Malaysia. Pelabuhan juga harus dibangun di Kalimantan Timur untuk memudahkan pengiriman sawit Indonesia ke Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat. "Membangun pelabuhan strategis untuk kepentingan curah dan kontainer dengan pendekatan geografis sehingga ongkos angkutnya lebih kompetitif. Dengan begitu, Indonesia bisa merajai dunia dari sisi produk hilir sawit," jelas Sahat.

GIMNI menyarankan delapan strategi yang bisa dilakukan Indonesia untuk menjadi Raja Hilir Sawit dunia. *Pertama*, memperkuat infrastruktur. *Kedua*, Indonesia harus bisa menurunkan biaya produksi dengan membuat industri sawit nasional lebih produktif. "Kita harus terapkan konsep *low cost production* dan intensifikasi, sehingga kami berharap biaya produksi minyak sawit mentah (*crude palm oil*/CPO) kita tidak lebih dari US$ 470 per ton," papar Sahat. *Ketiga*, perlu dibentuk satu lembaga atau badan khusus bernama Badan Pengembangan Industri Strategis Persawitan Indonesia, semua urusan persawitan ada di lembaga tersebut dan langsung di bawah Presiden dengan Badan [redacted] di [redacted] fokus

mengelola perizinan usaha sawit dari hulu hingga hilir, termasuk pemasaran produk di pasar global. "Saat ini, industri sawit melibatkan 17 kementerian/lembaga," ujar Sahat.

Keempat, menjalankan kebijakan moratorium sawit secara konsisten dan areal sawit yang kebablasan dinyatakan masuk areal kawasan hutan supaya dilepas, artinya kebijakan tata ruang harus probisnis hingga di tingkat kabupaten sehingga legalitas kebun sawit menjadi lebih jelas. "Dengan produktvitas yang tinggi maka pemerintah bisa mempertahankan moratorium," kata dia. *Kelima*, pengelolaan sawit dilakukan dengan korporatisasi seperti disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sehingga petani sawit mudah melaksanakan praktik pertanian yang baik (*good agricultural practices/GAP*).

Keenam, pengelolaan sawit harus mengikuti Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGS) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki 17 target sehingga kebun sawit Indonesia bisa mencapai target ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). *Ketujuh*, mengubah citra sawit, untuk melakukan hal ini industri sawit membutuhkan bantuan dari media massa. Saat ini, banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO) yang memposisikan bahwa sawit adalah konglomerat sehingga kalangan legislatif, yudikatif, dan eksekutif takut untuk membantu industri sawit. Padahal, begitu banyak petani yang tergantung dan mengandalkan sawit sebagai mata pencahariannya, hal inilah yang harus diubah, citrakan sawit adalah petani.

Kedelapan, pengembangan produk-produk hilir sawit baru dengan penguatan dan optimalisasi kegiatan riset dan pengembangan (*research and development*/R&D). "Apabila semua itu dijalankan, ada badan sawit, lahan dikelola dengan tertib secara korporatisasi, *replanting* berlangsung baik, mungkin pada 2023 Indonesia sudah bisa menjadi Raja Hilir Sawit dunia," kata Sahat.

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian terus mendorong pengembangan industri pengolahan kelapa sawit nasional. Kapasitas produksi industri pengolahan kelapa sawit dan turunannya mencapai 93,50 juta ton pada triwulan III-2020 atau meningkat dari periode yang sama 2019 sebesar 87,05 juta ton. Jenis ragam produk hilir yang dihasilkan industri dalam negeri juga bertambah, dari semula 126 produk pada 2014 menjadi 170 produk pada 2020, yang didominasi produk pangan dan bahan kimia dari sumber terbarukan. Saat ini, posisi Indonesia dari sisi jumlah produk hilir yang dihasillkan bersaing dengan Malaysia.

Tingkatkan Produktivitas

Indonesia merupakan negara khatulistiwa sehingga mendapatkan limpahan tanah yang subur dan curah hujan tinggi sehingga mampu memenuhi kebutuhan nutrisi penduduk dunia. Saat ini, penduduk dunia sekitar 7,90 miliar dengan peningkatan populasi 1,30% per tahun dan 83% di antaranya memiliki pendapatan di bawah US$ 1.200 per tahun dan mereka perlu nutrisi, nutrisi terbaik yang kaya vitamin, karotenoid, dan bersifat *affordable*. Jika mengandalkan *rapeseed* maka biaya produksinya US$ 640 per ton, minyak kedelai US$ 610 per ton, sedangkan biaya produksi sawit Indonesia US$ 500 per ton. Artinya, sawit layak menjadi pilihan.

Di Indonesia, terdapat tiga pelaku usaha sawit, yakni rakyat yang porsi 42%, BUMN, dan perkebunan swasta. Hanya saja, untuk kebun rakyat produktivitasnya hanya 1,60 ton CPO per ha per tahun dengan biaya produksi US$ 520 per ton, kebun BUMN 3,80 ton CPO per ha per tahun dengan biaya produksi US$ 500 per ton, kebun swasta 4,70 ton CPO per ha per tahun dengan biaya produksi sudah US$ 480 per ton. "Karena itu *replanting* kebun rakyat harus dijalankan sehingga produktivitas tinggi seperti perusahaan perkebunan swasta," papar Sahat.

Dengan menjadi Raja Hilir Sawit dunia, kata Sahat, bukan hanya pendapatan petani yang akan meningkat tapi nilai ekonomi sawit itu sendiri akan melonjak. Saat ini, nilai ekonomi sawit hanya US$ 85 miliar per tahun, namun ke depan bukan tidak mungkin begitu Indonesia menjadi Raja Hilir Sawit maka pada 2024 nilai ekonomi sawit kontribusinya bisa menjadi US$ 140-150 miliar per tahun. "Strategi-strategi yang sudah saya sampaikan itu harus dijalankan karena ada duit besar di depan mata. Coba untuk sektor kelautan dan perikanan nilai ekonominya hanya US$ 5 miliar dari sisi ekspor, ini sawit nilai ekonominya kalau dikembangkan bisa US$ 150 miliar," jelas dia.

SUBJEK

- ☐ Tanaman Pangan
- ☐ Hortikultura
- ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan
- ☐ Perkebunan
- ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian
- ☐ Litbang Pertanian
- ☐ Ketahanan Pangan
- ☐ Karantina Pertanian
- ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- ☐ Pertanian Umum

MEDIA

- ☐ Agro Indonesia
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Indo Pos
- ☐ Investor Daily
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Kompas
- ☐ Kontan
- ☐ Koran Jakarta
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Majalah Tempo
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Pelita
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Republika
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Sinar Tani
- ☐ Suara Karya
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ The Jakarta Post
- ☐ Fajar

TANGGAL /
HALAMAN /
RUBRIKASI
- ☐ Berita
- ☐ Berita Foto
- ☐ Opini/Artikel
- ☐ Tajuk
- ☐ Pojok/Karikatur

Harga Kedelai Impor Rp 8.500/Kg

JAKARTA–Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah melaksanakan upaya cepat dalam menstabilkan pasokan dan harga kedelai agar perajin tahu-tempe dapat terus berproduksi. Langkah cepat dalam 100 hari pertama adalah memastikan ketersediaan kedelai harus aman dan tidak terganggu, caranya harga kedelai impor dijual Rp 8.500 per kilogram (kg) ke perajin tahu-tempe.

Kementan terus mendorong gerakan stabilisasi pasokan dan harga kedelai yang telah diluncurkan di Jakarta oleh Mentan SYL pada Kamis (7/1). Mekanisme penyaluran dilakukan Kementan dengan menggandeng asosiasi importir untuk menjual ke perajin dengan harga kedelai Rp 8.500 per kg.

"Harapannya, para perajin ini bisa tetap berproduksi, memang ada kenaikan, dulu harga kedelai Rp 7.000 per kg, lalu naik sampai Rp 9.000 per kg bahkan lebih, kini disepakati menjadi Rp 8.500 per kg," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan Agung Hendriadi dalam gerakan stabilisasi pasokan dan harga kedelai Jawa Tengah di Kendal, kemarin.

Agung mengatakan, upaya itu sesuai arahan Presiden Jokowi kepada Menteri Pertanian, selain langkah cepat dalam 100 hari untuk stabilisasi pasokan dan harga kedelai, juga diikuti dengan upaya peningkatan produksi dan ketersediaan kedelai dalam negeri. Sehingga untuk selanjutnya, kebutuhan kedelai dapat disuplai secara mandiri. "Dalam 100 hari ke depan kita mendekatkan distributor dengan perajin tahu-tempe sehingga harga kedelai bisa Rp 8.500 per kg di tingkat perajin, kedua Kementan akan menggenjot produksi kedelai lokal, ketiga adalah menjadikan kedelai sebagai suatu komoditas yang kita monitor keberadaan dan harga," tegas Agung. 10.11/17

Harga jual kedelai dari importir ke perajin Rp 8.500 per kg adalah kesepakatan untuk 100 hari ke depan. "Kenapa 100 hari, karena dalam 100 hari ke depan kita sedang mempersiapkan benih, kita tahu bahwa importir masih punya stok kedelai dan ini bisa kita gunakan dalam 100 hari ke depan," ujarnya. Dengan harga kesepakatan tersebut, importir, tidak dirugikan dan dapat disebut sebagai *sharing profit*. Pada saat yang sama, perajin juga tidak perlu memperkecil ukuran tahu-tempem eskipun ada kenaikan harga tapi dia menilai tidak akan terlalu besar.

Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin mengapresiasi langkah cepat Kementan dalam memastikan pasokan dan harga kedelai di sejumlah daerah. Langkah tersebut merupakan langkah tepat karena pemerintah hadir di tengah kesulitan pedagang, perajin, dan para petani kedelai di Indonesia. **(dho)**

Petani Tak Untung karena Tingginya Harga Cabai

Seorang petani menunjukkan cabai rawit yang baru dipetik di Desa Balane, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Minggu (10/1/2021). Sejumlah petani setempat mengaku tidak menikmati tingginya harga cabai di pasaran yang mencapai Rp 80 ribu per kilogram karena harga yang diterimanya dari pedagang pengumpul hanya Rp 35 ribu sampai Rp 40 ribu per kilogram. 10.11/15

Harga Telur dan Daging Ayam Bergerak Turun

■ DEDY DARMAWAN NASUTION

JAKARTA — Tren harga komoditas telur dan daging ayam ras mulai mengalami penurunan. Kementerian Pertanian menyatakan, penurunan harga terjadi baik di tingkat konsumen maupun produsen karena permintaan dan pasokan yang mulai bergerak stabil.

Kepala Bidang Harga Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Inti Pertiwi memaparkan, penurunan harga dua komoditas tersebut sesuai dengan prediksi Kementan pada bulan lalu. "Betul harga mulai turun sesuai proyeksi," kata Inti kepada *Republika*, Ahad (10/1).

Mengutip data yang dimiliki BKP Kementan, harga telur ayam ras pada tingkat produsen secara nasional sebesar Rp 21.811 per kilogram (kg). Angka itu turun dari rata-rata bulan lalu yang berkisar Rp 23 ribu per kg.

Sementara itu, harga daging ayam ras juga telah mengalami penurunan menjadi Rp 21.803 per kg dari posisi bulan lalu yang sempat mendekati Rp 24 ribu per kg. Tren harga dua komoditas tersebut di tingkat konsumen mulai mendekati acuan pemerintah untuk kedua komoditas itu, yakni Rp 19 ribu hingga Rp 21 ribu per kg.

Lebih lanjut pada tingkat konsumen, harga komoditas tersebut juga mengalami tren penurunan. Masih dari sumber data yang sama, rata-rata harga nasional untuk telur ayam ras sebesar [illegible] hampir Rp 28 ribu per kg secara nasional dan untuk daging ayam ras lebih dari Rp 35 ribu per kg. Acuan harga pemerintah untuk tingkat konsumen, yakni Rp 24 ribu per kg untuk telur ayam dan Rp 35 ribu per kg untuk daging ayam ras.

Inti mengatakan, [illegible] harga sejumlah bahan pokok [illegible] pemerintah. Selain telur dan daging ayam ras, komoditas pangan strategis lainnya yang juga mengalami lonjakan harga, yakni aneka cabai.

Ia mengatakan, harga cabai diperkirakan akan mulai turun pada akhir pekan ketiga Januari. Hal ini seiring dengan adanya musim panen di wilayah Jawa Tengah yang menjadi sentra produksi nasional. "Cabai masih fluktuatif saat ini karena masih sulit melakukan panen," ujarnya.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) hingga Jumat (8/1), harga komoditas cabai merah berada pada level Rp 54.900 per kg. Angka itu mengalami penurunan dibandingkan posisi harga cabai merah pada akhir Desember 2020 seharga Rp 59.550 per kg.

Sementara itu, harga cabai rawit pada Jumat (8/1) berada pada level Rp 69.800 per kg. Angka itu melonjak dibandingkan harga pada akhir Desember 2020 yang sebesar Rp 61.150 per kg.

Senada dengan Inti, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan, harga telur dan ayam ras sudah mulai stabil. Abdullah menuturkan, tingkat permintaan terhadap telur dan ayam kembali normal. A. 11/1/21

Meski begitu, Abdullah menilai, fenomena itu didorong oleh lemahnya daya beli masyarakat. Mansuri menilai, tingkat permintaan secara umum terhadap komoditas bahan pokok di pasar tradisional tidak tinggi pada awal tahun ini.

"Relatif belum tinggi, terakhir ada kenaikan permintaan bahan pangan pada momen Natal dan tahun baru. Setelah itu, memang turun sampai saat ini," katanya. ■ ed: ahmad fikri noor

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	**TANGGAL**	/
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	**HALAMAN**	/
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	**RUBRIKASI**	☐ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya		☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan		☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post		☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika	☐ Fajar		☐ Pojok/Karikatur

Harapan Komisi IV

Tolong Ya, Bikin Petani Sejahtera

Komisi IV DPR menyayangkan kebijakan pemerintah menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi. Kebijakan ini justru memberatkan petani yang kesejahteraannya kini terus merosot.

ANGGOTA Komisi IV DPR Johan Rosihan mengatakan, kehidupan petani semakin sulit. Sementara di satu sisi, petani berupaya memacu produksinya. "Kami prihatin karena kebijakan ini justru makin memberatkan petani dan semakin memukul daya beli petani pada masa pandemi ini," kata dia di Jakarta, kemarin.

Menurut Johan, beberapa jenis pupuk bersubsidi yang HET-nya naik seperti pupuk urea yang semula Rp 1.800 per kilogram naik menjadi Rp 2.250 per kilogram, pupuk SP-36 yang semula Rp 2.000 perkilogram naik menjadi Rp 2.400 per kilogram. Demikian juga beberapa jenis pupuk lainnya yang dibutuhkan petani juga mengalami kenaikan.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian No 49 Tahun 2020 tertanggal 30 Desember 2020, yang mengatur tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi. Selain itu, pupuk ZA mengalami kenaikan Rp 300 menjadi Rp 1.700 per kg, dan pupuk organik granul naik sebesar Rp 300, dari yang semula Rp 500 per kg menjadi Rp 800 per kg.

Bagi politisi PKS ini, kebijakan ini tidak sensitif terhadap kesulitan petani saat ini, dan perlu ditinjau ulang. Daripada menaikkan harga pupuk yang justru makin memberatkan para petani, semestinya pemerintah fokus membantu petani agar semakin produktif melakukan kegiatan usaha tani.

Selain itu, dia minta pemerintah memastikan ketersediaan pupuk selalu terjaga di musim tanam tidak langka. Lalu, mengantisipasi berbagai permainan pupuk yang telah merugikan petani serta memperbaiki pola manajemen distribusi pupuk dan pengawasan di lapangan.

Bagi politisi asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat ini, banyak cara lain untuk mengatasi karut-marut pupuk subsidi ini daripada mengambil kebijakan yang keliru. "Subsidi pupuk untuk petani ini kan tujuannya melindungi petani, agar produktivitasnya meningkat. Pemerintah tidak boleh menambah beban petani dengan menaikkan HET pupuk bersubsidi," tegas Johan.

Hal senada dilontarkan kolega Johan di Komisi IV, Slamet. Menurutnya, kebijakan menaikkan HET pupuk bersubsidi ini tidak tepat dilakukan, mengingat pangan saat ini sangat dibutuhkan di masa pandemi ini.

Slamet khawatir, kenaikan ini akan memicu kejatuhan ekonomi yang lebih dalam dan menyulut persoalan baru di masyarakat. "Problem utama pupuk ini sebenarnya bukan di masalah harga, tapi di masalah ketersediaan. Di mana terjadi kelangkaan di saat petani membutuhkan," katanya.

Menurut Slamet, dalam berbagai kunjungan kerjanya ke berbagai daerah, keluhan yang paling sering didengar para anggota dewan adalah persoalan pupuk. Untuk itu, penting bagi pemerintah membenahi secara serius terkait tata kelola penyaluran pupuk tersebut sehingga persoalan pupuk ini tidak berlarut-larut. ■ KAL

Antiklimaks Drama Kedelai

BUSTANUL ARIFIN, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian UNILA, Ekonom Senior INDEF

Sentra produksi kedelai kian terbatas karena bersaing dengan padi, jagung, bahkan kelapa sawit.

Drama kenaikan harga kedelai karena Covid-19 yang mengganggu sistem logistik global berdampak bagi industri tahu-tempe di Indonesia. Kinerja produksi kedelai domestik yang tak memadai, membuat industri tahu-tempe mengandalkan kedelai impor, terutama dari AS.

[illegible] menarik perhatian pemerintah, [illegible] tempe melakukan protes dengan [illegible] selama tiga hari pada akhir [illegible]

[illegible] strat[illegible]-tempe "diizin[illegible] sampai 20[illegible] mempete-mukan" pera[illegible] mengimportir kedelai.

Selain itu, [illegible] pasar kedelai dengan harga [illegible] kilogram (kg), mulai Jumat 8 Januari 2021 (*Republika*, 7 Januari, 2021). "Operasi pasar" direncanakan berlangsung tiga bulan ke depan dan terus dimonitor dan dievaluasi.

Dinamika kedelai global

Sebenarnya, [illegible] global selama 2020 normal, bahkan naik [illegible] persen, mencapai [illegible] juta ton, tertinggi, terutama karena [illegible] produksi di Brasil dan AS.

Pangsa produksi kedelai dua negara ini hampir 80 persen dari total kedelai global. Disusul Argentina (15 persen), Cina (5 persen), dan India (3 persen). Produksi kedelai Brasil hampir 130 juta ton, disusul produksi kedelai AS 112 juta ton.

Harga kedelai tingkat global sebenarnya tak bermasalah karena stok cukup baik. Namun, harga melonjak sangat tajam sepanjang 2020. Akhir [illegible] harga kedelai 503 dolar AS per ton, naik berlipat dari harga pada April yang masih 365 dolar AS per ton.

Pandemi Covid-19 mengganggu sistem logistik global, bahkan [illegible] kontainer yang [illegible] perdagangan internasional. Kompleksitas perdagangan sistem pasar berjangka ikut berkontribusi pada kenaikan harga kedelai global.

Kenaikan harga itu juga dipicu manuver Cina yang menaikkan volume impornya, untuk mengamankan stok kedelai menjelang Hari Raya Imlek, sampai 30 juta ton. Industri pangan berbasis kedelai dan industri pakan ternak Cina berkembang amat pesat dalam dua dekade terakhir.

Kinerja kedelai domestik

Indonesia hanya mampu memproduksi kedelai sekitar [illegible] ton, jauh dari cita-cita [illegible] pada yang di-[illegible] enam tahun [illegible]. BPS sejak 2018 [illegible] data produksi kedelai karena proses revisi [illegible] estimasi produksi belum selesai dihitung.

[illegible] Indonesia [illegible] 3 juta ton atau lebih separuh impor kedelai [illegible] harus dikurangi [illegible] 2,5 juta–3 juta ton setiap tahun. Kedelai impor ini

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- ☐ Tanaman Pangan
- ☐ Hortikultura
- ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan
- ☐ Perkebunan
- ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian
- ☐ Litbang Pertanian
- ☐ Ketahanan Pangan
- ☐ Karantina Pertanian
- ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- ☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	**TANGGAL** /
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	**HALAMAN** /
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	**RUBRIKASI** ☐ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika	☐ Fajar	☐ Pojok/Karikatur

yang digunakan [illegible] baku industri tahu-tempe [illegible] industri pangan [illegible] lainnya.

Indonesia juga mengimpor bungkil kedelai 4 juta-6 juta ton, sebagai bahan baku pakan ternak dan perikanan. Cukup banyak studi ekonomi pertanian tentang produksi kedelai domestik yang terus menurun, dan kemustahilan Indonesia mencapai swasembada kedelai.

Hasil-hasil studi berimplikasi bahwa Indonesia tidak [illegible] memaksakan diri mencapai swasembada. Ketergantungan impor kedelai [illegible] persen, fakta yang harus [illegible]. Sentra produksi kedelai [illegible] karena bersaing dengan padi, [illegible] kelapa sawit.

[illegible] pertanaman kedelai masih dapat [illegible] di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan hanya sebagian kecil di Indonesia Timur. Kedelai ditanam sebagai tanaman rotasi setelah padi dan/atau jagung.

Sebagai penutup, "operasi pasar" dengan meminta importir kedelai menjual atau memasok perajin tahu-tempe secara teratur, perlu dilihat sebagai solusi temporer. Reformasi kebijakan rantai nilai kedelai yang lebih strategis harus segera dirumuskan ke depan.

Pertama, lebih baik fokus pada produksi kedelai kualitas tinggi, tidak harus bersaing *head-to-head* dengan kedelai impor, yang memiliki efisiensi produksi lebih tinggi dan harga murah.

Indonesia mampu memproduksi kedelai hitam, sebagai bahan baku industri kecap khas dan bercita rasa tinggi, sekaligus dengan produk turunan yang juga bernilai tambah tinggi.

Kedua, peningkatan produktivitas dan kualitas kedelai domestik menggunakan varietas unggul, yang telah di-adaptasi dengan kondisi iklim dan agro-ekosistem Indonesia. Walaupun berukuran lebih kecil, kedelai domestik umumnya lebih gurih dan sangat sesuai sebagai bahan baku tahu atau setidaknya untuk dicampur dengan kedelai impor.

Ketiga, perbaikan sistem insentif ekonomi rantai nilai kedelai, dari sistem produksi di hulu, distribusi, dan perdagangan di tengah, serta jaminan kepastian pasar di hilir. Tak ada petani rasional yang akan menanam kedelai dan meningkatkan produtivitasnya jika penerimaan ekonomi dari kedelai lebih rendah dari biaya produksinya.

Keempat, pengembangan tanaman legum lain sebagai alternatif bahan baku tahu-tempe, misalnya kacang tolo putih, yang lebih adaptif terhadap agro-ekosistem Indonesia. Kacang tolo putih juga sebagai sumber protein tinggi dan menjadi pangan fungsional masa depan. ■

2

SUBJEK

- ☐ Tanaman Pangan
- ☐ Hortikultura
- ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan
- ☐ Perkebunan
- ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian
- ☐ Litbang Pertanian
- ☐ Ketahanan Pangan
- ☐ Karantina Pertanian
- ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- ☐ Pertanian Umum

MEDIA

- ☐ Agro Indonesia
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Indo Pos
- ☐ Investor Daily
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Kompas
- ☐ Kontan
- ☐ Koran Jakarta
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Majalah Tempo
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Pelita
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Republika
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Sinar Tani
- ☐ Suara Karya
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ The Jakarta Post
- ☐ Fajar

TANGGAL /

HALAMAN /

RUBRIKASI

- ☐ Berita
- ☐ Berita Foto
- ☐ Opini/Artikel
- ☐ Tajuk
- ☐ Pojok/Karikatur

BAROMETRO

Tahu dan Tempe Makin Dicari di Masa Pandemi

[illegible], Litbang Kompas

K 4/1/21 Senin

Bagi masyarakat Indonesia, tempe dan tahu bukanlah sebatas lauk-pauk pelengkap makanan. Tempe tahu [illegible] di piring makan setiap orang hampir setiap hari dan semakin dicari sejak pandemi.

Tidak heran ketika terjadi lonjakan harga kacang kedelai, bahan baku pembuatan tempe dan tahu, pengusaha tempe tahu [illegible] dan [illegible] penjual [illegible] kedelai [illegible] catatan [illegible] Kompas.id [illegible] di awal tahun ini [illegible] Rp 8.000 per kilogram [illegible] Rp 9.500 per kg. Sebagian pengusaha tempe tahu, seperti yang berada di Jakarta, sempat mogok kerja demi menarik perhatian pemerintah agar turun tangan mengatasi lonjakan harga itu (Kompas.id, 7 Januari 2021).

Masyarakat umum turut bereaksi atas lonjakan harga kedelai dan mogok kerja para pembuat tempe tahu. Mereka waswas pasokan makanan kesukaannya bakal terganggu. Pemerintah akhirnya turun tangan dan menjanjikan untuk penstabilan kembali harga kedelai.

Animo masyarakat Indonesia dalam mengonsumsi tempe [illegible] cukup besar. [illegible] tempe dan tahu [illegible] setiap bulan.

Angka itu menunjukkan dalam sehari orang mengonsumsi minimal sepotong tempe atau tahu. Kebiasaan orang mengonsumsi tempe dan tahu setiap hari pun cenderung tak banyak berubah dalam lima tahun belakangan.

Publikasi Susenas itu juga menunjukkan bahwa tempe lebih digemari masyarakat ketimbang tahu. Tempe dikonsumsi hampir dua kali lebih banyak daripada tahu. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata setiap orang mengonsumsi 24 potong tempe setiap bulan. Sementara, konsumsi tahu per orang hanya 13 potong dalam sebulan.

Orang pun tak segan merogoh kocek lebih untuk mengonsumsi tempe atau tahu. Harganya yang jauh lebih murah ketimbang sumber protein lain, seperti telur atau daging ayam, menjadikan tempe dan tahu terus dicari.

Pada Maret 2016, setiap orang rata-rata mengeluarkan uang Rp 9.900 per bulan untuk membeli tempe dan tahu. Pada bulan yang sama tahun 2020, rata-rata orang menambah pengeluaran sekitar Rp 1.000 per bulan untuk membeli dua jenis makanan ini.

Penggemar tempe dan tahu [illegible] banyak hingga dua makanan protein ini pun menjadi salah satu komoditas pangan yang turut menentukan batas kemiskinan. Tempe dan tahu berada di urutan keempat dari 10 komoditas yang paling menentukan garis kemiskinan, merujuk data BPS Maret 2020.

Tak mengherankan jika kelangkaan tempe dan tahu yang terjadi di sejumlah wilayah beberapa waktu lalu menjadi hal ramai dibicarakan. Tempe dan tahu menjadi sumber makanan penting yang terjangkau masyarakat miskin.

Gaya hidup

Namun, tempe-tahu tak hanya dicari masyarakat kelas bawah. Harganya yang murah dan mudah diperoleh menjadikan popularitas tempe dan tahu meluas di kalangan masyarakat menengah atas.

Tempe dan tahu pun tak hanya diolah menjadi makanan dengan cara digoreng, direbus, atau berbentuk keripik/kerupuk yang paling umum dikenal orang. Kini semakin banyak juga bermunculan kreasi olahan tempe dan tahu yang dipadupadankan sedemikian rupa menjadi rolade,

1

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- ▢ Tanaman Pangan
- ▢ Hortikultura
- ▢ Peternakan dan Kesehatan Hewan
- ▢ Perkebunan
- ▢ Prasarana dan Sarana Pertanian
- ▢ Litbang Pertanian
- ▢ Ketahanan Pangan
- ▢ Karantina Pertanian
- ▢ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- ▢ Pertanian Umum

MEDIA

- ▢ Agro Indonesia
- ▢ Bisnis Indonesia
- ▢ Indo Pos
- ▢ Investor Daily
- ▢ Jurnal Nasional
- ▢ Kompas
- ▢ Kontan
- ▢ Koran Jakarta
- ▢ Koran Tempo
- ▢ Majalah Tempo
- ▢ Media Indonesia
- ▢ Pelita
- ▢ Rakyat Merdeka
- ▢ Republika
- ▢ Seputar Indonesia
- ▢ Sinar Harapan
- ▢ Sinar Tani
- ▢ Suara Karya
- ▢ Suara Pembaruan
- ▢ The Jakarta Post
- ▢ Fajar

TANGGAL /

HALAMAN /

RUBRIKASI

- ▢ Berita
- ▢ Berita Foto
- ▢ Opini/Artikel
- ▢ Tajuk
- ▢ Pojok/Karikatur

brownies, cokelat serabi, spageti, steik, biskuit, bakso, dan aneka makanan lainnya.

Aneka variasi makanan berbahan tempe dan tahu juga identik dengan gaya hidup kuliner masyarakat menengah atas, khususnya di perkotaan. Dari data BPS, individu di kawasan perkotaan mengonsumsi tempe dan tahu rata-rata 40 potong per bulan. Sementara di perdesaan lebih sedikit, 34 potong per orang tiap bulan.

Secara nominal, individu di perkotaan rata-rata mengeluarkan uang lebih dari Rp [illegible] membeli te[illegible] ngeluaran di [illegible] dah, kurang dari Rp 10.000 per orang [illegible]

K[illegible] dan tahu [illegible] naik kelas [illegible] tahu [illegible] 2019. Di antaranya Festival Tahu [illegible], Festival Kampung Tahu (Sukoharjo), Festival Ngintip Tahu (Cirebon), dan Festival Banjir Tahu (Lumajang).

Diburu

Kini, pandemi Covid-19 juga membawa tempe dan tahu menjadi makanan yang semakin sering dicari. Hal ini terindikasi dari impor kedelai yang meningkat signifikan sejak pandemi.

Kementerian Pertanian dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR pertengahan November 2020 menyampaikan, impor kedelai sepanjang Januari-September 2020 mencapai 5,71 juta ton. Pada periode yang sama tahun 2019, impor kedelai tercatat 5,12 juta ton (*Kontan*, 18/11/2020).

Kedelai sebagai bahan baku utama tempe dan tahu semakin dicari lantaran manfaatnya yang penting bagi kesehatan tubuh. Makanan fermentasi kedelai tersebut, menurut Antonius Suwanto, Dekan Fakultas Teknobiologi Unika Atma Jaya, dalam webinar "Peran Tempe di Masa New Normal", kaya akan prebiotik dan paraprobiotik yang bermanfaat mendukung kekebalan tubuh.

Tempe memang lebih digemari dibandingkan tahu. Namun, di masa pandemi Covid-19 ini, keduanya sama-sama semakin diburu. Selain harganya yang terjangkau, para penggemar tahu-tempe juga mencarinya untuk meningkatkan imunitas.

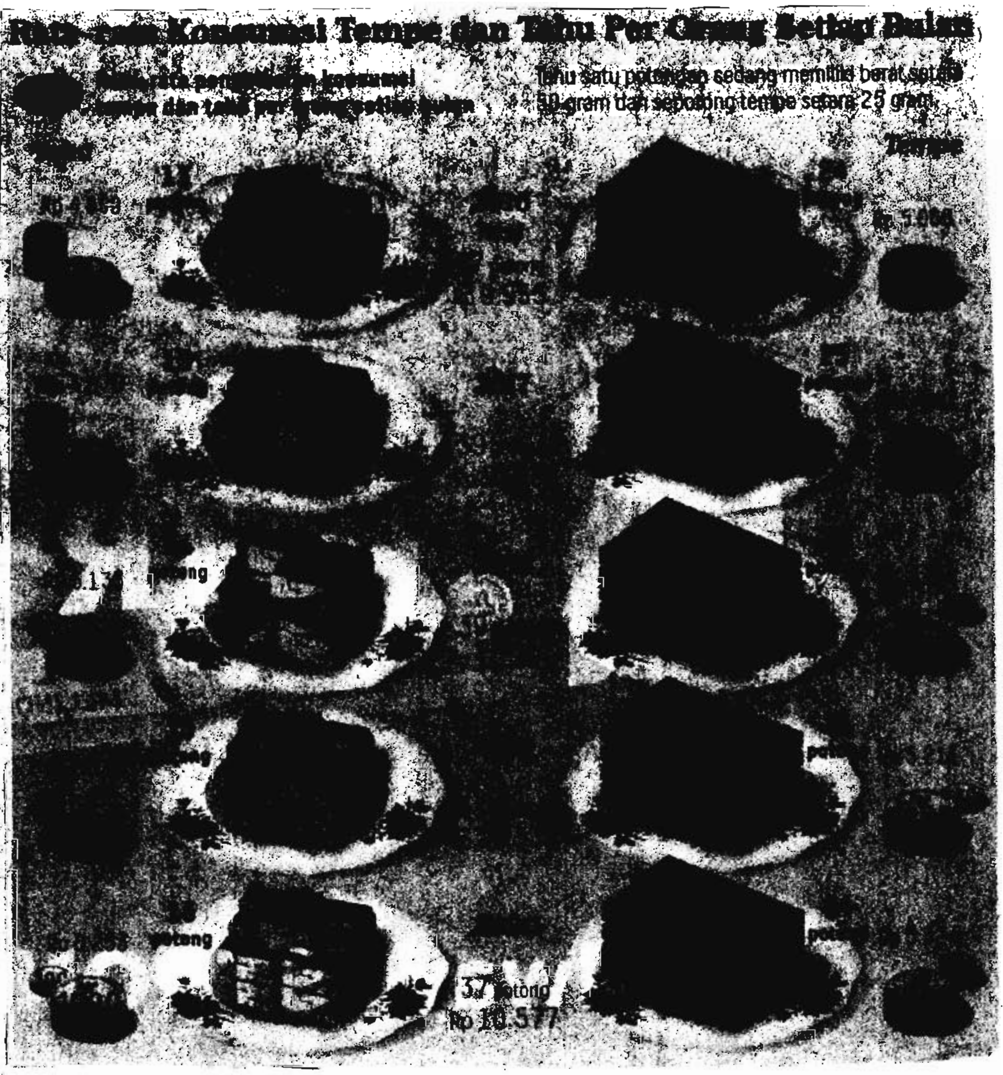

2

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- ☐ Tanaman Pangan
- ☐ Hortikultura
- ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan
- ☐ Perkebunan
- ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian
- ☐ Litbang Pertanian
- ☐ Ketahanan Pangan
- ☐ Karantina Pertanian
- ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- ☐ Pertanian Umum

MEDIA

- ☐ Agro Indonesia
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Indo Pos
- ☐ Investor Daily
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Kompas
- ☐ Kontan
- ☐ Koran Jakarta
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Majalah Tempo
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Pelita
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Republika
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Sinar Tani
- ☐ Suara Karya
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ The Jakarta Post
- ☐ Fajar

TANGGAL /

HALAMAN /

RUBRIKASI

- ☐ Berita
- ☐ Berita Foto
- ☐ Opini/Artikel
- ☐ Tajuk
- ☐ Pojok/Karikatur

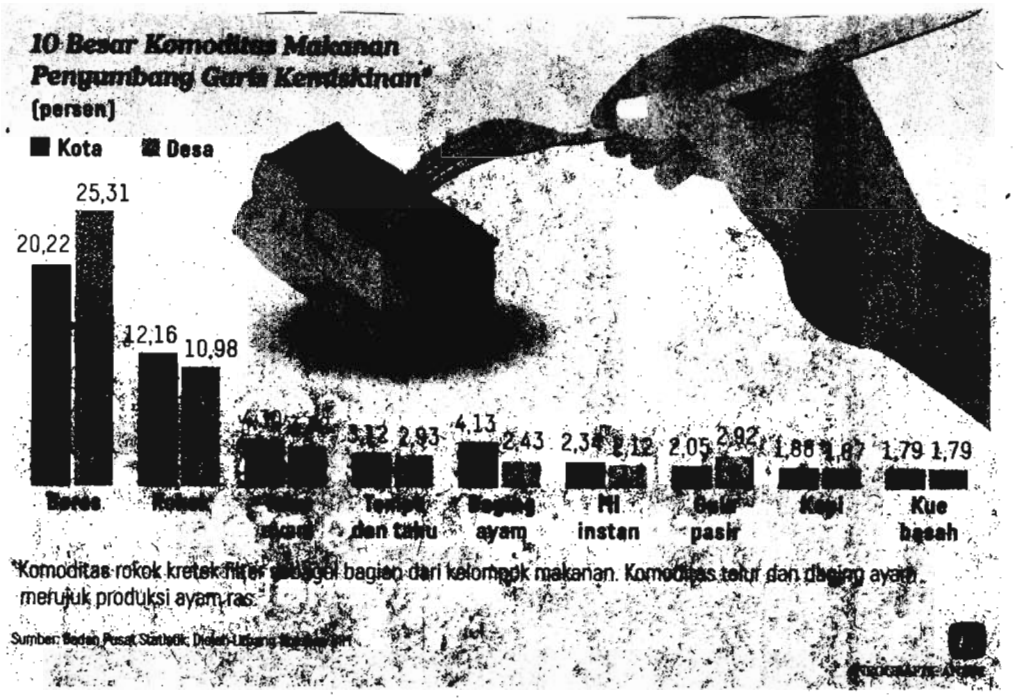

3

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- ☐ Tanaman Pangan
- ☐ Hortikultura
- ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan
- ☐ Perkebunan
- ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian
- ☐ Litbang Pertanian
- ☐ Ketahanan Pangan
- ☐ Karantina Pertanian
- ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- ☐ Pertanian Umum

MEDIA

- ☐ Agro Indonesia
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Indo Pos
- ☐ Investor Daily
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Kompas
- ☐ Kontan
- ☐ Koran Jakarta
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Majalah Tempo
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Pelita
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Republika
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Sinar Tani
- ☐ Suara Karya
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ The Jakarta Post
- ☐ Fajar

TANGGAL /

HALAMAN /

RUBRIKASI

- ☐ Berita
- ☐ Berita Foto
- ☐ Opini/Artikel
- ☐ Tajuk
- ☐ Pojok/Karikatur

• Prof Munif Ghulamahdi •

Realisasi Harga Jawa[illegible]

Belum mamp[illegible] [illegible]tekan [illegible] enggan [illegible]

PUTRI ROSMALIA
putri@mediaindonesia.com

UNTUK kesekian kalinya Indonesia mengalami lonjakan harga kedelai. Untuk kesekian kalinya pula pangkal permasalahan sama, yakni kenaikan harga kedelai impor. MI 10/1/16

Bila sebelumnya harga kedelai impor berkisar Rp6—7 ribu per kilogram, di awal 2021 harganya mencapai lebih dari Rp9 ribu. Kenaikan harga menyebabkan perajin tahu dan tempe mogok yang pada akhirnya membuat kelangkaan bahan pangan itu di pasaran. Hal yang sama telah terjadi pada 2012 dan 2014.

Di sisi lain, telah berulang kali pula solusi swasembada kedelai dikemukakan untuk mengatasi permasalahan harga itu. Dalam renstra Kementerian Pertanian yang disusun di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, swasembada kedelai ditargetkan terealisasi paling lambat pada 2020.

Lalu mengapa swasembada kedelai tampak sulit tercapai dan bagaimana sebenarnya perbandingan kualitas kedelai lokal dengan impor? Berikut amatan pakar kedelai dan Guru Besar Ekofisiologi Institut Pertanian Bogor, Prof Dr Ir Munif Ghulamahdi, MS dalam wawancara dengan *Media Indonesia*, Rabu (6/1):

Indonesia kembali mengalami kelangkaan kedelai, apa pangkal persoalannya, menurut Anda?

Persoalan utama[illegible]

[illegible] pernah [illegible] dalam pasokan kedelai [illegible] tanam [illegible] produktivit[illegible] pemerintah [illegible] pemerintah [illegible] untuk bisa [illegible] kedelai apa[illegible] [illegible]bada. Di 2015 [illegible]

[illegible] hingga fasilitasi pemasar[illegible] [illegible]nya dengan [illegible]

[illegible] Bersa[illegible]

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- ☐ Tanaman Pangan
- ☐ Hortikultura
- ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan
- ☐ Perkebunan
- ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian
- ☐ Litbang Pertanian
- ☐ Ketahanan Pangan
- ☐ Karantina Pertanian
- ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- ☐ Pertanian Umum

MEDIA

- ☐ Agro Indonesia
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Indo Pos
- ☐ Investor Daily
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Kompas
- ☐ Kontan
- ☐ Koran Jakarta
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Majalah Tempo
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Pelita
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Republika
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Sinar Tani
- ☐ Suara Karya
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ The Jakarta Post
- ☐ Fajar

TANGGAL /
HALAMAN /
RUBRIKASI
- ☐ Berita
- ☐ Berita Foto
- ☐ Opini/Artikel
- ☐ Tajuk
- ☐ Pojok/Karikatur

…ada tetap butuh …hirnya swasem…ai?

…erat kondisinya. …019) berada pada …n per tahun. Jadi … sangat tinggi … impornya. Jadi …kali untuk tidak … impor kalau ti-

dak benar-benar diupayakan.

Namun, jika semua pembenahan dan usahanya dari hulu ke hilir dilakukan dengan serius, secara bertahap swasembada itu bisa saja tercapai, Mungkin setidaknya dalam lima tahunlah bisa mulai tercapai swasembada kalau memang semua dilakukan dengan benar dan serius.

Untuk memperluas area tanam bagaimana, tentunya ini bukan sekadar soal kemauan, melainkan juga jenis lahannya?

Soal lahan itu memang kita harus pikirkan bagaimana agar lahannya tersedia, harus ada upaya efisiensi lahan dan biaya produksi. Harus dipikirkan bagaimana menerapkan pola tanam kedelai pada berbagai tipologi lahan. Lahan kalau dibagi secara sederhana ada dua, lahan sawah dan kering. Nah, lahan-lahan yang ada itu yang kita efisiensikan.

Di lahan kering biasaya ada perkebunan misalnya kelapa sawit. Kelapa sawit kalau kita lihat data itu ada 600 ribu hektare yang *replanting* atau ditanam kembali, kita masuk ke situ atau istilahnya tanam sela. Lalu misalnya jagung, ada yang di lahan sawah ada yang di lahan relatif kering, cari lahan-lahan yang subur, jagung kita itu ada sekitar 4,5 juta hektare. Kita bisa masukkan pola-pola tanam sederhana atau seperti tumpang sari. Jadi, supaya biayanya tidak terlalu mahal, mengolahnya ikut jagung, tinggal benihnya masuk, jadi mungkin pemerintah membantu di pola-pola seperti itu. Peluang seperti itu harus dilirik dan dijalankan oleh pemerintah kalau memang mau swasembada tercapai. Karena kalau mau membuka lahan baru tentu lebih sulit dan mahal, jadi pikirkan cara-cara lain yang bisa digunakan.

Bukankah cara tanam sela itu juga sudah banyak diupayakan? Kenapa belum berhasil dan lalu bagaimana dengan temuan Anda soal budidaya kedelai di lahan pasang surut atau jenuh air?

Tanam sela sebenarnya beberapa kali pernah, tapi belum masif dan konsisten. Itu yang harus diperbaiki karena kalau tidak berkelanjutan ya akan sulit tercapai, termasuk juga harus libatkan lebih banyak pihak lagi yang terkait seperti perguruan tinggi hingga industrinya. Selama ini kan hanya kalau lagi rame isunya semangat jalankan programnya, kalau sudah sepi perhatiannya lalu melambat lagi usahanya, selalu begitu selama ini, jadi ya belum berhasil swasembada sampai saat ini.

Soal budi daya lahan pasang surut, pada 2016, Pak Menteri (Amran Sulaiman) pernah lakukan percobaan di Jambi di 500 hektare lahan. Dapat hasil 2,4 ton lalu Pak Menteri minta dinaikkan jadi 20 ribu hektare, tetapi lalu harga bagaimana. Dipanggillah dari Bulog untuk diminta dipasarkan dengan harga minimal Rp7 ribu, tapi ternyata tidak mampu juga. Akhirnya petani mencari solusi sendiri menjualnya dengan harga rendah. Jadi, masalahnya

2

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- ☐ Tanaman Pangan
- ☐ Hortikultura
- ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan
- ☐ Perkebunan
- ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian
- ☐ Litbang Pertanian
- ☐ Ketahanan Pangan
- ☐ Karantina Pertanian
- ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- ☐ Pertanian Umum

MEDIA

- ☐ Agro Indonesia
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Indo Pos
- ☐ Investor Daily
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Kompas
- ☐ Kontan
- ☐ Koran Jakarta
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Majalah Tempo
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Pelita
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Republika
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Sinar Tani
- ☐ Suara Karya
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ The Jakarta Post
- ☐ Fajar

TANGGAL /

HALAMAN /

RUBRIKASI

- ☐ Berita
- ☐ Berita Foto
- ☐ Opini/Artikel
- ☐ Tajuk
- ☐ Pojok/Karikatur

itu-itu lagi, di pemasaran lagi. Meski ada metode baru, ya masih sulit kalau belum ada perbaikan di manajemennya.

Bagaimana peningkatan produktivitas kedelai lokal dengan impor?

Kalau dari segi kualitas, kita punya kedelai-kedelai yang baik dan tak kalah dengan impor. Kita punya yang besar-besar juga seperti yang banyak dihasilkan dari impor, tetapi memang tidak sustain ketersediaan kedalinya karena penanamannya juga tidak sustain.

Terkait perubahan iklim sekarang ini apakah akan memengaruhi tanaman kedelai?

Kedelai ini kan sebenarnya berasal dari wilayah subtropis, tapi sudah adaptif di Indonesia sejak lama. Jadi tidak masalah. Masih banyak wilayah di Indonesia yang iklimnya sangat baik untuk dijadikan lahan pertanian kedelai, misalnya saja di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kalau Anda berkunjung ke sana, banyak daerah yang lembab dan sesuai untuk pertanian kedelai. Bahkan FAO saja sudah mulai memetakan daerah-daerah tempat untuk pertanian pangan, khususnya kedelai di beberapa wilayah. NTB dan NTT secara kondisi alamnya baik. Untuk kedelai ini kan harus yang intensitas radiasinya tinggi, di wilayah yang cerah. Jadi kalau dari segi lahan tidak ada masalah, masih aman, asal airnya juga dicukupi maka akan subur.

Jadi dari berbagai sisi sebenarnya kita mampu memenuhi asal [illegible] pemerintah dalam pemasaran dan menjaga harganya. Saya rasa pemerintah sebenarnya sudah cukup berpengalaman untuk melakukan berbagai upaya itu. (M-1)

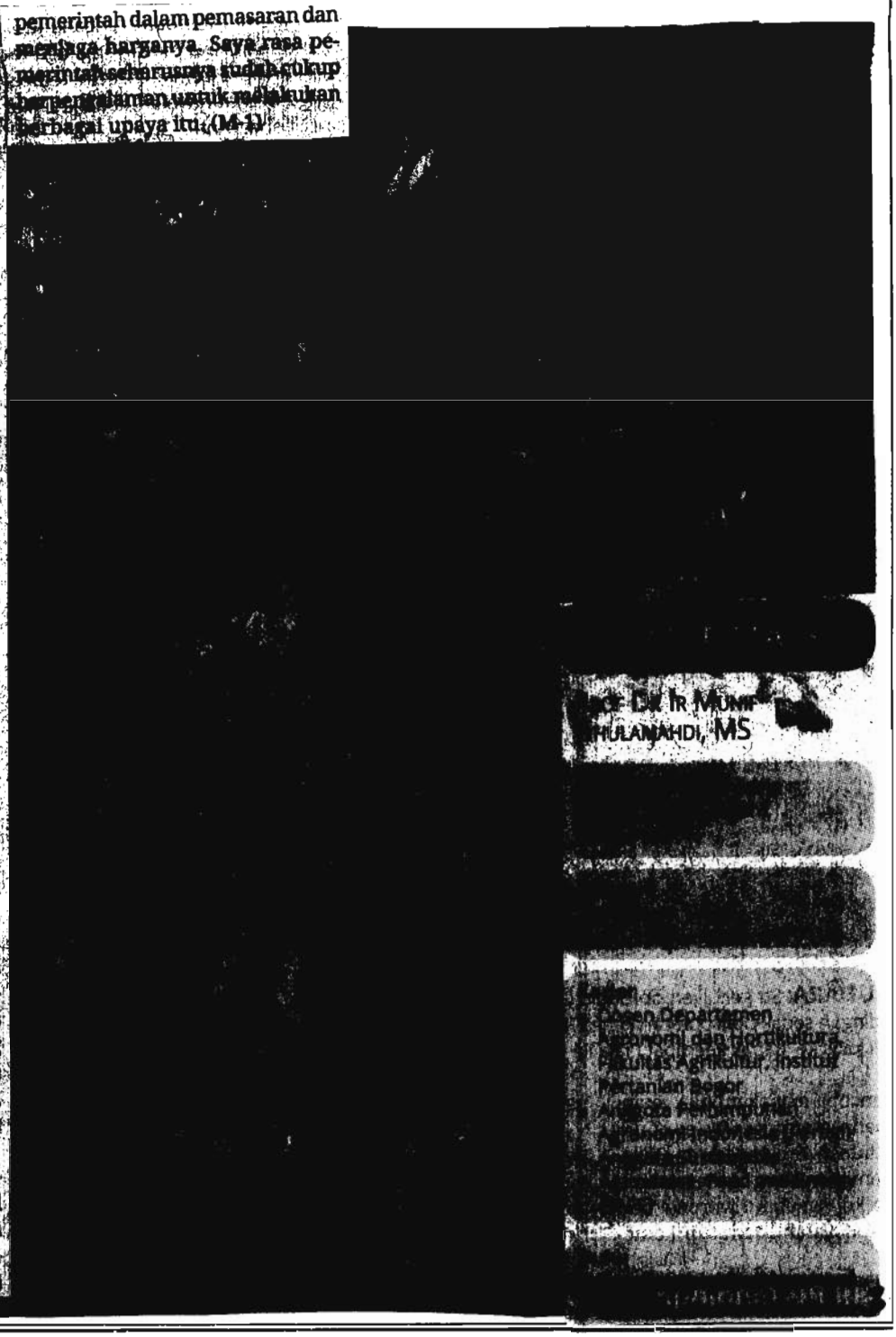

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- ☐ Tanaman Pangan
- ☐ Hortikultura
- ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan
- ☐ Perkebunan
- ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian
- ☐ Litbang Pertanian
- ☐ Ketahanan Pangan
- ☐ Karantina Pertanian
- ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- ☐ Pertanian Umum

MEDIA

- ☐ Agro Indonesia
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Indo Pos
- ☐ Investor Daily
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Kompas
- ☐ Kontan
- ☐ Koran Jakarta
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Majalah Tempo
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Pelita
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Republika
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Sinar Tani
- ☐ Suara Karya
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ The Jakarta Post
- ☐ Fajar

TANGGAL /

HALAMAN /

RUBRIKASI

- ☐ Berita
- ☐ Berita Foto
- ☐ Opini/Artikel
- ☐ Tajuk
- ☐ Pojok/Karikatur

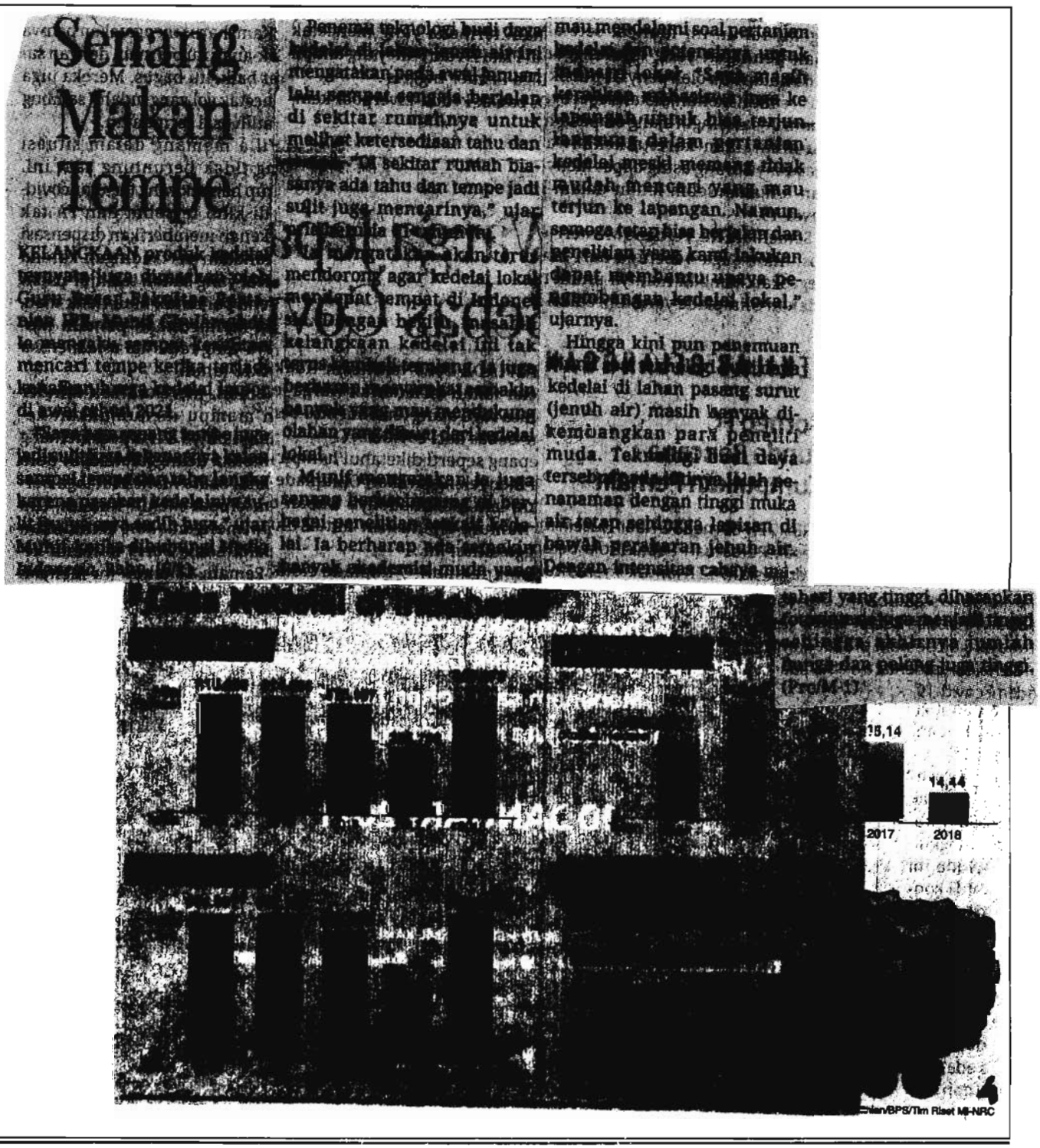

Senang Makan Tempe

15,14

14,44

2017 2018

SUBJEK

- ☐ Tanaman Pangan
- ☐ Hortikultura
- ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan
- ☐ Perkebunan
- ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian
- ☐ Litbang Pertanian
- ☐ Ketahanan Pangan
- ☐ Karantina Pertanian
- ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- ☐ Pertanian Umum

MEDIA

- ☐ Agro Indonesia
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Indo Pos
- ☐ Investor Daily
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Kompas
- ☐ Kontan
- ☐ Koran Jakarta
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Majalah Tempo
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Pelita
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Republika
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Sinar Tani
- ☐ Suara Karya
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ The Jakarta Post
- ☐ Fajar

TANGGAL /
HALAMAN /
RUBRIKASI
- ☐ Berita
- ☐ Berita Foto
- ☐ Opini/Artikel
- ☐ Tajuk
- ☐ Pojok/Karikatur

Opini

Saatnya Memuliakan Petani

Siapakah sebenarnya pahlawan sejati saat ini? Pertanyaan ini amat penting diajukan dan sekaligus menjadi sebuah kontemplasi ketika kita tengah melangkah memasuki tahun 2021 yang beriringan dengan pandemi Covid-19. Musim pandemi virus korona baru yang belum diketahui kapan berakhir membutuhkan kepahlawanan untuk mengatasi kondisi bangsa yang tertekan. Ia berjuang dengan gagah berani tanpa pamrih.

Kita patut merenung, siapa yang bergelut dengan peluh tanpa mengenal lelah menyediakan pangan untuk bangsa ini tanpa takut terinfeksi Covid-19? Mereka adalah para petani yang mau memberikan seluruh tenaga dan pikiran untuk memperkuat pilar kedaulatan pangan. Petani berjuang secara individu atau kelompok di tengah keterbatasan pemerintah menyediakan pupuk bersubsidi, memperbaiki irigasi, dan sarana produksi lainnya.

Nilai-nilai kepahlawanan telah melekat pada profesi petani karena mereka memiliki simbol perjuangan kemanusiaan. Memberikan ruang kepada petani sebagai pahlawan adalah sikap bijak yang patut ditiru di masa mendatang. Betapa tidak! Petani tetap bekerja keras memproduksi pangan di tengah risiko dan ketidakpastian perubahan iklim, meski terkadang hampir putus asa.

Sayangnya, kesejahteraan para pahlawan ketahanan pangan masih belum seperti yang diharapkan. Fakta di lapangan, kendala yang dialami petani sangat banyak dan ruwet, mulai dari sulit mendapatkan pupuk, benih, hingga memasarkan hasil panen. Petani terpaksa menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga yang murah karena pasar tradisional yang waktu operasionalnya singkat belakangan ini karena pandemi Covid-19.

Masih tingginya angka kemiskinan–80% dari orang miskin adalah petani–menjadi bukti sektor pertanian semakin tidak menarik lagi. Implikasinya, bangsa ini mengalami problema amat serius, yakni ketidakpercayaan diri sebagai bangsa agraris yang justru seharusnya menjadi kekuatan ekonomi kerakyatan. Setiap tahun, bangsa ini selalu defisit pangan dan menjadi pintu pembuka keran impor beras, jagung, daging, dan bahan pangan lainnya, seperti garam, bawang putih, dan susu yang menguras devisa.

Indonesia telah gagal sebagai negara agraris. Derasnya arus urbanisasi ke Jakarta dan kota-kota besar lainnya setiap tahun menjadi bukti konkrit. Salah satu akar persoalannya ialah sempitnya akses petani kecil dan buruh tani di desa terhadap tanah, infrastruktur, dan sarana produksi pertanian.

Smart farming

Tidak mengherankan, Jakarta kian hari kian macet karena warga desa mengalir terus ke sana untuk mengais rezeki. Kemacetan berkepanjangan menyebabkan kerugian yang nilainya mencapai Rp 50 triliun per tahun atau setara nilai APBD selama 50 tahun untuk sebuah kabupaten. Kerugian itu berupa pemborosan bahan bakar minyak (BBM), waktu kerja, serta

Posman Sibuea,
Guru Besar Ilmu Pangan
Unika Santo Thomas Medan

1

16

kelambatan angkutan barang dan angkutan penumpang umum.

Sejatinya, pembangunan pertanian harus dikawal dengan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pengadaan irigasi, jalan desa, benih, traktor, pupuk, pestisida, dan listrik masuk desa. Sektor pertanian harus dibuat sedemikian rupa untuk menarik perhatian ge-

nerasi muda menggeluti profesi sebagai petani guna membangun *smart farming*. Namun, karena sektor ini dipandang sebagai sumber kemiskinan, generasi muda dari desa berimigrasi ke Jakarta demi mencari pekerjaan.

Apa yang bisa diharapkan dari petani berusia tua yang tidak melek dengan teknologi pertanian yang kini mengawal ketahanan pangan? Meski mereka terus bekerja di sawah dan ladang, hampir tidak ada keluarga petani di desa yang bercita-cita agar anaknya menjadi petani. Sudah menjadi rahasia umum, seseorang menjadi petani karena tidak ada lagi pilihan lain. Tinggal di desa yang jauh dari hidup mewah perkotaan, bukan lagi mimpi generasi muda saat ini.

Memuliakan petani dalam program pembangunan *smart farming* menjadi kata kunci. Secara kasat mata, tak semua warga bernyali menjadi pahlawan ketahanan pangan karena minimnya perhatian pemerintah. Bagi sebagian orang, lebih mudah menjadi pahlawan kesiangan, yakni orang yang kerap memosisikan diri sebagai pejuang tapi nihil perbuatan.

Munculnya banyak calon bupati dan calon gubernur dari berbagai partai politik menjelang Pilkada 2020 dapat menjadi contoh betapa kita lebih suka menjadi pahlawan kesiangan: Setelah terpilih menjadi bupati dan gubernur tidak bisa mengembangkan sektor pertanian di daerahnya. Sebab, tidak memiliki platform yang dapat menerjemahkan visinya untuk memajukan kesejahteraan petani dan warga lainnya.

Target pemerintah untuk mencapai swasembada pangan dengan membangun *food estate* patut mendapat dukungan. Namun, kaum tani yang bekerja tanpa kenal lelah mempersiapkan proses produksinya, jarang mendapat *reward* atas pencapaian target itu.

Sebaliknya, pemerintah yang selalu mengklaim keberhasilannya membangun pertanian, meski subsidi yang diberikan kepada pahlawan ketahanan pangan ini makin berkurang dari tahun ke tahun. Harga gabah kering giling per kilogram yang ditetapkan pemerintah nilai riilnya juga semakin berkurang.

Ironisnya lagi, warga kota kerap terkontaminasi virus konsumerisme yang menganggap produk pertanian impor lebih baik ketimbang hasil pertanian lokal. Lihatlah di sejumlah pusat perbelanjaan, pengelolanya lebih bangga menjual buah impor untuk menarik pembeli dibandingkan dengan mempromosikan mangga, apel, rambutan, salak, dan lain-lain yang diproduksi petani kita.

Program pemerintah yang dikemas dalam bingkai Nawacita untuk membangun pertanian dari pinggiran belum terwujud dengan baik. Padahal, tujuannya tidak sekadar ingin meningkatkan produksi, tetapi sekaligus membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan petani lewat teknologi agroindustri pangan. Percepatan pembangunannya patut dipahami sebagai bagian revitalisasi pertanian guna

memberi nilai tambah kepada petani lokal sekaligus mereduksi arus perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian.

Pembangunan pertanian pun masih terkesan bak macan ompong yang hanya diperdengarkan saat pidato politik petinggi partai. Sebagai negara agraris, sebagian besar penduduknya memeras keringat di sektor pertanian, seharusnya para petinggi republik ini menghargai jasa para petani sebagai pahlawan ketahanan pangan. KN. 8/1/11

Dan, tahun 2021 bisa menjadi tahun kebangkitan *smart farming* dan pemerintah harus memuliakan petani di era yang sarat teknologi digital. Seperti pesan Presiden Joko Widodo bahwa di tengah pandemi Covid-19 sektor pertanian perlu didorong secara *extraordinary* dari semua lini, mulai modal usaha, teknologi, kemudahan memperoleh pupuk subsidi, hingga irigasi. Tindakan ini akan mengantarkan sektor pertanian tidak lagi terkesan sebagai profesi yang terpinggirkan yang tidak punya masa depan. ■

3